

**EFEKTIFITAS PERDA KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TERHADAP
PEMBERLAKUAN SIUP**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

JEKSON ANTON HALASAN SIMANJUNTAK

NIM. 0810110153

Program Konsentrasi Hukum Administrasi Negara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP
PEMBERLAKUAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN BAGI
USAHA KECIL**

(Studi di Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Malang)

Oleh:

JEKSON ANTON HALASAN SIMANJUNTAK

NIM. 0810110153

Disetujui di Malang, __ Januari 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H. M.H

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H. M.H

NIP. 19590717 198601 1 001

NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H. M.Hum

NIP: _____ - _____ - _____

EFEKTIFITAS PERDA KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TERHADAP PEMBERLAKUAN SIUP

ABSTRAK

Jekson Anton Halasan Simanjuntak, marloniel@yahoo.com, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2014, *Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil (Studi di Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)*, Agus Yulianto, S.H. M.H; Dr. Shinta Hadiyantina, S.H. M.H.

Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas permasalahan yang meliputi dua hal, yang pertama adalah bagaimana efektifitas Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap pemberlakuan SIUP Bagi Usaha Kecil serta yang kedua adalah mencari apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Efektifitas Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap pemberlakuan SIUP Bagi Usaha Kecil di Kota Malang.

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Metode Pendekatan yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pengambilan jenis dan sumber data serta populasi dan sampel dalam penelitian ini berdasarkan dari wawancara dengan Kasubdin Bagian Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang serta wawancara terhadap sejumlah pemilik unit usaha kecil di wilayah Kota Malang. Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif analisis.

Dari hasil yang didapat, penulis merasa bahwa pemberlakuan SIUP pada usaha kecil belum terwujud maksimal. Dilihat dari jumlah perkembangan usaha kecil baik yang dilengkapi SIUP maupun tidak, perkembangan tersebut dirasa lamban mengingat banyaknya usaha yang berkembang di Kota Malang. Pemberlakuan SIUP di Kota Malang, sesuai Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010, terdapat dua konsekuensi hukum terhadap usaha kecil yang tidak melengkapi usahanya dengan SIUP yaitu konsekuensi hukum sanksi administrasi serta konsekuensi hukum sanksi pidana.

Untuk lebih terwujudnya efektifitas pemberlakuan SIUP secara maksimal, maka perlu adanya perbaikan secara menyeluruh baik secara kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur yang memadai sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain antara usaha kecil dan pemerintah.

Kata Kunci : Peraturan Daerah Kota Malang, Surat Ijin Usaha Perdagangan

The Effectiveness Of Regulatory Region Of Malang Number 8 in 2010 With
Respect To The Enactment Of The Trade Business Documents

ABSTRACT

Jekson Anton Halasan Simanjuntak, marloniel@yahoo.com, Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, January 2014, *The Effectiveness of Regulatory Region of Malang Number 8 in 2010 About Organizing Efforts of Industry and Trade with Respect to the Enactment of the Licence Trade for Small Businesses (studies in Small Business Unit and Office of Industry and Trade of Malang)*, Agus Yulianto, S.H., m. h.; Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H

On the writing of this thesis, the author discusses the problems that includes two things, the first is how the effectiveness of Regulatory region of Malang number 8 in 2010 against the enforcement of the trade Business Documents For small business and the second is looking for anything that becomes a factor restricting the effectiveness of local regulations and supporter of Malang number 8 in 2010 against enforcing the Licence Trade for Small Businesses in the city of Malang.

This type of research is categorized as empirical legal research. The method used is the method of Approach Approach Juridical Sociological. Retrieval of the type and source of data as well as the population and the sample in this study based on interviews with the Head of sub Department of The Trade of the Department of industry and trade of Malang and interviews of a number of unit owners of small businesses in the city of Malang. To analyze data, used method of descriptive analysis.

From the results obtained, the authors felt that the enactment of the Trade Business Documents on small businesses have yet to materialize. Judging from the number of small business development well equipped Business Trade Licence or not, these developments proved sluggish given the multitude of businesses that thrive in the city of Malang. The enactment of the Trade Business License in the city of Malang, according local regulations of Malang number 8 in 2010, there are two legal consequences against small businesses that do not complement its Business Licence trading business with the legal consequences of sanctions administration as well as the legal consequences of criminal sanctions.

To more of the realization of the effectiveness of the license, trade business maximally hence the need of repairs thoroughly well as the quality of human resources and adequate infrastructure so as to be created a mutually beneficial relationship each other between small enterprises and the government.

Keywords : Regional Regulations Of Malang, Trade Business License

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sistem ijin memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk membatasi aktifitas masyarakat agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun motif-motif yang digunakan suatu sistem ijin ialah keinginan Pemerintah untuk mengarahkan aktifitas-aktifitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu, pemerataan bagi daerah-daerah yang sedikit, untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas.

Salah satu bentuk perijinan yang paling umum adalah Ijin Usaha, Ijin Usaha telah lama dikenal oleh masyarakat umum, tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat bekerja secara efektif. Adapun beberapa keluhan dan hambatan yang diungkapkan oleh masyarakat, ini juga turut mempengaruhi efektifitas pengurusan Ijin Usaha, begitu juga dengan pegawai dinas tampaknya kurang begitu sering mensosialisasikan perihal Ijin Usaha.

Pada dasarnya keberadaan sektor usaha kecil dapat menyediakan atau membuka lapangan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Adanya usaha kecil maka akan menyerap banyak tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga secara tidak langsung keberadaan industri telah banyak membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berjumlah besar.

Hampir semua bidang usaha memerlukan adanya ijin, hal ini bisa dilihat dari ketentuan Surat Ijin Usaha Perdagangan atau yang selanjutnya disingkat dengan SIUP, memiliki makna surat yang digunakan untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan. Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan memulai menjalankan usahanya untuk melaksanakan ketentuan masalah SIUP, khususnya ketentuan mengenai ijin, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Namun dalam lapangan perijinan tersebut, sering kali ditemui adanya masalah antara pihak pemberi ijin yang membebani berbagai persyaratan dan kewajiban serta sanksi yang diberikan oleh pemerintah, dengan pihak pemohon ijin yang harus memenuhi syarat dan memenuhi kewajiban. Kebanyakan dari perusahaan atau usaha kecil terhimpit dalam permasalahan modal. Aset mereka belum dapat memenuhi pembiayaan pembuatan surat-surat ijin yang diwajibkan negara untuk dapat didirikannya suatu industri atau usaha kecil yang terdaftar pada negara. Persyaratan mendapatkan SIUP diwajibkan untuk melampirkan Ijin Lokasi, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu hingga bisa mendapatkan SIUP. Biaya Ijin Lokasi, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu bagi pemilik usaha kecil dirasa sulit untuk dipenuhi. Sekalipun mereka tahu itu diperlukan untuk pengembangan usaha. Pengembangan usaha kecil dalam aturannya hanya memerlukan biaya relatif terjangkau, tetapi kenyataannya di lapangan bisa berlipat ratusan kali. Mahalnya pengurusan berbagai perijinan usaha membuat usaha kecil menjadi sulit untuk berkembang. Sehingga pada realita yang terjadi, masih banyak usaha kecil yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Malang sebenarnya membawa dampak positif terhadap pemerintah Kota Malang yang sebagian besar pendapatan daerah bertumpu pada sektor perdagangan. Namun tidak begitu halnya dengan usaha kecil tersebut didirikan tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha Perdagangan yang jelas. Pemerintah Kota Malang pun berupaya untuk mengatur dan mengawasi perkembangan sektor perindustrian dan perdagangan.

Wujud upaya pemerintah daerah Kota Malang dalam mengatur perkembangan sektor perindustrian dan perdagangan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemberian ijin di bidang perdagangan yang telah diberikan dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah.

Menurut Hamid Attamimi, “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh bupati atau walikota/kepala daerah kabupaten/kota bersama-sama dengan DPRD kabupaten/kota, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota, yaitu bupati atau walikota dan DPRD kabupaten/kota”¹

Maka untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang usaha perindustrian dan perdagangan di Kota Malang dibentuklah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan yang isinya mengatur tentang perijinan usaha perdagangan, perijinan usaha perindustrian serta sanksi administrasi bagi bidang usaha yang melanggar ketentuan.

Unit Usaha Kecil Kota Malang yang memiliki misi untuk meningkatkan usaha kecil yang ada di Kota Malang menjadi usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri dan berperan dalam perekonomian daerah diharapkan untuk lebih intensif melaksanakan program sosialisasi lembaga tersebut kepada pengusaha-pengusaha kecil bahwa sudah seharusnya usaha mereka dilengkapi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan juga menjelaskan kemudahan dalam mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut serta manfaat yang bisa diperoleh pengusaha kecil tersebut dengan adanya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang mereka dapatkan bagi kelangsungan usahanya. Jika pemerintah Kota Malang mau melindungi dan memberdayakan segmen usaha ini, kiranya sudah saatnya untuk bisa memulai dengan membantu mempermudah perijinan usaha mereka dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada usaha kecil, terlebih apabila ada permasalahan-permasalahan yang berkenaan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil (Studi di Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)”.

¹ Hamid Attamimi, Ilmu Perundang-undangan : Jenis,Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm 203.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil di Kota Malang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil di Kota Malang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer² dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan untuk mengkaji Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil yang dikaitkan dengan realita yang terjadi di lapangan dan aspek sosial yang mempengaruhinya.

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

PEMBAHASAN

1. Analisis Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan terhadap pemberlakuan SIUP pada Usaha Kecil di Kota Malang.

Efektif atau tidaknya suatu kaedah hukum atau peraturan dapat ditinjau dari 4 (empat) faktor³, yaitu:

- a. Kaedah hukum atau peraturan hukum itu sendiri;
- b. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkannya;
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum tersebut;
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Apabila salah satu dari keempat faktor tersebut tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka kaedah hukum atau peraturan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Analisis Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan SIUP pada usaha kecil Kota Malang berdasarkan pada komponen-komponen teori hukum sebagai suatu sistem.

a. Komponen Substansi

Komponen substansi adalah norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum yang berada di balik sistem hukum. Suatu peraturan memiliki muatan-muatan yang dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya setelah peraturan hukum tersebut diberlakukan ke dalam masyarakat. Kelebihan dan kekurangan itulah yang menentukan arah hukum tersebut menuju arah yang lebih baik.

³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologis Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm 14

b. Komponen Kultur

Komponen kedua adalah komponen kultur budaya hukum. Komponen ini menyangkut soal tingkat kesadaran masyarakat dalam proses penegakan hukum, komponen ini juga sangat berpengaruh sebab akan menentukan apakah hukum yang akan diberlakukan dapat ditaati atau tidak dapat diterima di masyarakat. Penulis mengumpulkan data dengan media angket dan wawancara sehingga data yang diperoleh benar-benar representatif dan memiliki nilai akurasi tinggi. Penulis mengambil sampel sejumlah 15 usaha kecil yang tersebar di Kota Malang untuk mengetahui tentang jumlah usaha kecil yang dilengkapi SIUP dengan jumlah usaha kecil yang tidak dilengkapi SIUP.

Jadi, dalam penjelasan tentang sistem hukum kedua komponen itulah yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Jika dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan terhadap pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di Kota Malang, jika di analisis dari teori efektifitas hukum maka dapat diketahui bahwa pemberlakuan SIUP pada usaha kecil Kota Malang kurang efektif.

2. Faktor-faktor Penghambat dan Faktor-faktor Pendukung Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terhadap pemberlakuan SIUP pada Usaha Kecil di Kota Malang.

Usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, potensi, dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa mendatang.

Pertumbuhan usaha kecil mulai memberikan dampak positif terhadap setiap perekonomian negara. Usaha kecil merupakan kegiatan yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Usaha kecil memiliki peran dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Menurut data terakhir⁴ yang didapat penulis, di Kota Malang terdapat 9857 buah usaha kecil. Dari jumlah keseluruhan jumlah usaha kecil tersebut terdapat 4181 buah usaha kecil yang dilengkapi dengan SIUP. Sedangkan usaha kecil yang tidak dilengkapi dengan SIUP berjumlah 5676 buah. Dari jumlah tersebut dapat diketahui perbedaan yang signifikan antara usaha kecil yang memiliki SIUP dan usaha kecil yang tidak memiliki SIUP di Kota Malang.

Jadi faktor-faktor yang melatarbelakangi usaha kecil tidak melengkapi usahanya dengan SIUP adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki cukup biaya;
- b. Proses dan persyaratan pengajuan SIUP rumit dan berbelit-belit;
- c. Sengaja menghindari pajak.

⁴ Wawancara dengan Kasubdin bagian perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan Kota Malang pada tanggal 13 Desember 2013

Banyak dari usaha kecil yang beranggapan bahwa SIUP belum dianggap penting. Jika usaha kecil tidak kesulitan dalam hal dana dan pemasaran, maka barulah pemilik usaha kecil berfikir untuk melengkapi usahanya dengan SIUP karena SIUP merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akses perbankan.

Disamping faktor-faktor yang dirasa memberatkan pihak pemohon SIUP diatas, terdapat juga beberapa faktor yang dirasa meringankan bagi pihak pemohon SIUP. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Proses pengurusan permohonan SIUP yang cepat;
- b. Tarif pengajuan permohonan penerbitan SIUP relatif terjangkau;
- c. Terdapat sanksi yang tegas bagi usaha kecil yang tidak dilengkapi SIUP pada usaha perdagangannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan dan hasil pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan bagi usaha kecil sebagai berikut :

1. Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan terhadap pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan bagi usaha kecil jika dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan dirasa masih kurang efektif karena masih banyak usaha kecil di Kota Malang yang belum memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan kurangnya penyuluhan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengenai SIUP secara langsung kepada pemilik-pemilik usaha kecil yang belum memiliki SIUP.
2. Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.
 - a. Beberapa faktor penghambat efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan yang menyebabkan usaha kecil tidak melengkapi usahanya dengan Surat Ijin usaha Perdagangan, yaitu:
 - 1) Merasa bahwa biaya pengurusan SIUP mahal;
 - 2) Proses pengurusan SIUP yang rumit dan berbelit-belit;
 - 3) Sengaja menghindari pajak;
 - 4) SIUP tidak penting bagi usahanya.

- b. Beberapa faktor pendukung efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan yang menyebabkan usaha kecil melengkapi usahanya dengan Surat Ijin usaha Perdagangan, yaitu:

- 1) Proses pengurusan permohonan SIUP yang cepat;
- 2) Tarif pengajuan permohonan penerbitan SIUP relatif terjangkau;
- 3) Terdapat sanksi yang tegas bagi usaha kecil yang tidak dilengkapi SIUP pada usaha perdagangannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha, dan perlindungan hukum. Hal tersebut dapat memberikan rangsangan positif bagi usaha kecil untuk dapat mengembangkan usahanya.
2. Perlu adanya peningkatan pengawasan internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku instansi penerbit Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta mengoptimalkan peran masyarakat khususnya pemilik usaha kecil untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran dalam mentaati peraturan perundang-undangan agar jumlah pelanggaran yang timbul dapat dikurangi semaksimal mungkin atau bahkan dihilangkan sehingga antara usaha kecil dan pemerintah (khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan) terdapat hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lain.
3. Menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan agar dapat memberikan kemudahan persyaratan dalam pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anni Chairani Sumantri, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Usaha Kecil*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1998

Hamid Attamimi, *Ilmu perundang-undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 1988

Jusuf Arianto, *Industri kecil dan perspektif Pembinaan dan Pengembangan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996

Komarudin, *Kamus Riset*, Penerbit Airlangga, Bandung, 1973

W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984

Lawrence M Friedman, *Teori Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Kesaint Blanc, Jakarta. 1975, hlm 25

M.Tohar, *Membuka Usaha Kecil*. Kanisius. Yogyakarta. 1999

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Cetakan Keempat, 1990

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001

Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980

Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

Zainal, *Seluk Beluk Pengajuan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Untuk Masyarakat Pengusaha*. Liberty. Yogyakarta. 1983

[Http://www.malangkota.bps.go.id](http://www.malangkota.bps.go.id)

[Http://perindag.malangkota.go.id](http://perindag.malangkota.go.id)

Undang-undang:

Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Daftar Tenaga Kerja

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
289/MPP/Kep/10/2001 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan
Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang
Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perindustrian dan Perdagangan